

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2008**

**NOMOR : 38**



---

---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 752 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 550 TAHUN 2008  
TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU (PPTSP)**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
- b. bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan perizinan dan menjamin kepastian hukum dalam proses perizinan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota ;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 ;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah ;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung ;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan ;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 ;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan;
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Bandung;
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
37. Peraturan ...

37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
38. Keputusan Walikota Nomor 874 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Kepariwisata Khusus Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
39. Keputusan Walikota Nomor 703 Tahun 1987 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengeluaran Rekomendasi dan/atau Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPM) bagi para Pengusaha Industri Kepariwisata Tertentu di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
40. Keputusan Walikota Nomor 946 Tahun 1992 tentang Lokasi Tempat Usaha dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Kepariwisata Khusus Bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Panti Pijat, Panti Mandi Uap (Sauna), Kelab Malam (Night Club), Diskotik dan Sanggar Tari di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
41. Keputusan Walikota Bandung Nomor 939 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
42. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1021 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
43. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengairan dan Retribusi Pengairan;
44. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1230 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Gangguan dan Izin Usaha;
45. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1871 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan pada Pemerintah Kota Bandung;
46. Peraturan Walikota Bandung Nomor 797 Tahun 2005 tentang Penggolongan Usaha Sarana Kepariwisata;
47. Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 470 Tahun 2008;
48. Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 550 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP).

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

(2) Petugas pengolahan dan penerbitan perizinan mencetak naskah perizinan dan SKRD untuk diparaf/ditandatangani oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

(1) Dokumen perizinan yang telah ditandatangani, disampaikan kepada Petugas Sekretariat Badan untuk dilakukan pengadministrasian dan pengarsipan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagan alur tata cara pemrosesan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dilakukan penyesuaian sebagaimana pengaturan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Setiap permohonan atas satu izin tertentu dan/atau beberapa izin secara paralel, pemohon wajib membayar retribusi, sesuai ketentuan yang berlaku dengan membayar ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Besarnya jasa retribusi harus dibayar pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam SKRD yang diterbitkan oleh Badan dalam rangkap 4 (empat) sebagai bukti pembayaran.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Surat Tanda Setoran (STS) retribusi daerah yang telah disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 1 (satu) lembar disampaikan kepada SKPD teknis sebagai bukti pembayaran.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 24 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 38